



004

Keamanan Lingkungan ASEAN Pasca - Perang Dingin

Oleh: Hilman Adil

membawa koeksistensi bersama di bawah bayangan dominasi Cina. Meski persamaan seperti itu sudah kuno dan semestinya ditinggalkan, ada beberapa kesamaan antara situasi pasca-Perang Dingin ASEAN dengan Asia Tenggara pra-penjajahan.

Pengalaman historis menunjukkan bahwa ASEAN harus selalu mempunyai suatu kebijakan atas kemungkinan ancaman potensial dari Cina. Diterimanya Vietnam dalam ASEAN dapat meningkatkan persepsi-persepsi ancaman pada organisasi regional ini. Namun, sementara Cina mengambil suatu posisi keras atas pemeliharaan legitimasi teritorial, ASEAN mengaku tidak melihat ancaman dalam waktu dekat dari Cina. Mereka menerima Cina sebagai suatu kenyataan hidup. Berbagai hubungan ASEAN dan Cina yang sedang berkembang berlangsung bersamaan dengan adanya bukti keinginan dari anggota-anggota ASEAN guna menjajaki hubungan-hubungan jangka panjang dengan Cina. ASEAN mempunyai

kepentingan besar atas keberhasilan perekonomian Cina sembari berhati-hati menghindari ketergantungan yang berlebihan. Pada tahun 1994, sekitar 6% dari total perdagangan tahunan ASEAN dilangsungkan dengan Cina. Sekitar 50% bangsa Cina perantauan di Asia, atau 22 juta orang akan ditemukan di ASEAN. Mereka kini telah terasimilasi dan, melalui aktifitas perdagangan dan investasi yang giat dengan Cina, berperan sebagai suatu kekuatan yang menarik Cina ke arah Asia Tenggara, saling ketergantungan serta perdagangan global.

Cina memiliki beberapa keuntungan positif dari hubungannya dengan ASEAN. Akses terhadap investasi, teknologi dan keahlian memberikannya keuntungan-keuntu-



Sepuluh pemimpin negara - negara ASEAN

Arsitektur keamanan kawasan Asia-Pasifik pada dekade mendatang akan berupa suatu transisi menuju pembentukan suatu struktur kekuasaan, yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), RRC, Rusia dan Jepang. Suatu pertanyaan yang sangat penting yang akan menentukan takdir Asia Tenggara adalah tantangan-tantangan apakah yang akan dihadapi ASEAN dalam struktur tersebut pada kawasan yang sangat berarti secara strategis, ekonomis, keamanan dan politis bagi keempat kekuatan utama tersebut. Isu-isu menonjol yang akan mempunyai muatan atas stabilitas kawasan adalah klaim-klaim teritorial yang telah lama berlangsung dan memiliki tingkat signifikansi yang

berbeda-beda, termasuk yang paling penting, atas kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Isu lain yang mungkin akan mempunyai signifikansi politik bagi stabilitas kawasan adalah masalah pergantian kepemimpinan pada negara-negara kunci ASEAN seperti Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir dan periode transisi Indonesia di bawah Presiden Abdurrahman Wahid.

Sumber-Sumber Friksi di Asia Tenggara: Kasus Cina

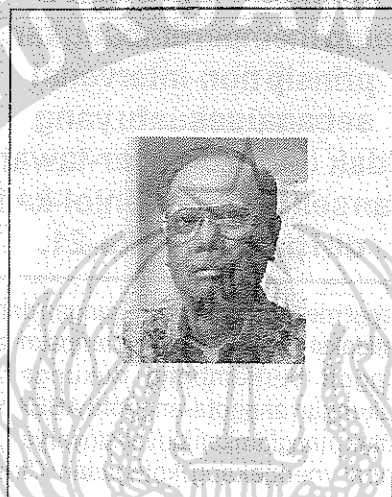
Pada masa pra-penjajahan, sekitar 300 tahun lalu, negara-negara Asia Tenggara telah mengembangkan suatu sistem hubungan internasional dan perdagangan yang maju, yang



The Security Environment of Asean in The Post - Cold War

By: Hilman Adil

The security architecture of the Asia-Pacific region in the next decade will be one of transition towards the formation of a power structure, consisting of the United States, China, Russia, and Japan. A pivotal question which will decide the destiny of Southeast Asia is what challenges ASEAN will have to face in such a structure where the region has strategic, economic, security and political significance for those four major powers. Salient issues which will have a bearing on the region's stability are longstanding territorial claims of varying significance, including most significantly, over the Spratley Islands in the South China Sea. Another issue which might have some political significance for the region's stability is the problem of leadership changes in key ASEAN countries, like Malaysia under Prime Minister Mahathir and the transitory period in Indonesia under President Abdulrachman Wahid.



Historical experience suggest, that for ASEAN there must always remain a certain prudence about the possibility of a potential threat from China. The admission of Vietnam to ASEAN may increase threat perceptions within the regional organization. But while China adopts a hard position on maintaining territorial legitimacy, ASEAN profess little sense of imminent danger from China. They accept China as a fact of life. Growing ASEAN connections with China are accompanied by an evident willingness on the part of individual ASEAN states to explore the prospect for long-term relations with China. ASEAN retains a strong interest in China's economic success whilst keen to avoid over-dependence. In 1994, some 6% of total annual ASEAN trade is with China. Around 50% of the overseas Chinese in Asia, or 22 million, are to be found in ASEAN. They are assimilated and through vigorous trade and investment

activities with China, they act as force pulling China in the direction of Southeast Asia, interdependence and the global economy.

There are a number of positive benefits for China in the ASEAN relationship. Access to investment, technology and expertise provide it with obvious advantages. Political links with ASEAN confer upon China a relationship with countries shared experiences of international pressure over democracy and human rights. China and most ASEAN states place economic development and the collective good ahead of notions of individual liberty. China's willingness to join in the activities of the Asian Regional Forum (ARF) is proof of the preparedness to acknowledge ASEAN's relevance to China's interests, although if past experience is relevant, it is likely that China will circumscribe the ARF's multilateral security dialogue wherever it impinges on essential Chinese interests.

Competing claims between China and individual ASEAN members (Philippines, Malaysia, Brunei and Vietnam) over the Spratley Islands has lead to intermittent sharpness in relations. The unanimity with which ASEAN collectively has reacted to Chinese actions in the Spratley Islands to assert claims may have surprised Beijing. It is difficult, nonetheless, to deduce what advantages China would see from deliberate escalation, involving military annexation and conflict. Such threat to sea lanes of communication (SLORC) vital to Japan, the United

Sources of Friction in Southeast Asia : The Case Of China

In pre-colonial times, some 300 years ago, the countries of Southeast Asia developed a sophisticated system of international relations and commerce, which involved coexisting, in the shadow of an ascendant China. However, although trite parallels should be discountend, there are similarities in the situation of a post-Cold War ASEAN, and a pre-colonial Southeast Asia.



ngan konkrit. Berbagai hubungan politik dengan ASEAN memberi Cina suatu hubungan terhadap negara-negara yang memiliki pengalaman-pengalaman yang sama dalam hal tekanan internasional atas demokrasi dan HAM. Cina dan mayoritas negara-negara ASEAN menempatkan pembangunan ekonomi dan manfaat kolektif di atas dugaan-dugaan kebebasan individu. Kemauan Cina melibatkan diri di dalam berbagai aktifitas ASEAN Regional Forum (ARF) adalah bukti kesiapannya guna mengakui pertalian ASEAN terhadap berbagai kepentingan Cina, meskipun – jika pengalaman relevan – Cina berkemungkinan akan membatasi dialog keamanan multilateral ARF sewaktu pembicaraan telah bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan Cina yang mendasar.

Persaingan berbagai klaim antara Cina dengan beberapa anggota ASEAN (Filipina, Malaysia, Brunei dan Vietnam) atas kepulauan Spratly telah sewaktu-waktu mengarah kepada ketegangan hubungan. Keputusan ASEAN yang dihasilkan secara kolektif dalam bereaksi terhadap tindakan-tindakan Cina di kepulauan Spratly guna menegaskan berbagai klaim mungkin telah mengagetkan Beijing. Meskipun demikian, adalah hal yang sulit untuk menyimpulkan keuntungan-keuntungan apakah yang terlihat oleh Cina dalam kesengajaannya menimbulkan eskalasi dengan aneksasi militer dan konflik. Ancaman seperti itu atas jalur-jalur komunikasi laut (SLORC) yang vital bagi Jepang, A.S. dan negara-negara lainnya akan dengan cepat memperluas ruang lingkup kepentingan.

Kepemimpinan Cina mengakui kebutuhan absolutnya mengkonsentrasikan diri terhadap tantangan-tantangan besar yang ditimbulkan perubahan sosial-ekonomi internal selama jangka waktu setengah abad (atau lebih) ke depan. Peningkatan eskalasi atas kepulauan Spratly tidak akan membantu tujuan tersebut. Fakta usaha-usaha untuk membatasi berbagai bentrokan yang terjadi di sana menuju suatu tingkat pengem-

dalian memberikan bukti adanya perhitungan hati-hati Cina. Akan tetapi, anggota-anggota ASEAN terutama sekali terganggu ketika Beijing menyatakan klaimnya terhadap seluruh kepulauan dan gugusan karang di Laut Cina Selatan. Sebagai akibatnya, ketidakpercayaan terhadap Cina sedang meningkat meskipun Cina berusaha meyakinkan bahwa dirinya tidak akan menjalani tindakan unilateral yang

Dilemma yang sedang dihadapi ASEAN jika ia tetap mempertimbangkan prinsip non-intervensi sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawarkan semakin menonjolkan diri pada abad ke-21.

dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan kawasan. Tampaknya tengah berkembang dukungan-dukungan anggota-anggota ASEAN untuk mengirinkan sinyal-sinyal yang dapat mengekang ketegasan Cina yang semakin meningkat. Sebagai contoh, Indonesia, yang memiliki ladang-ladang gas (terbesar di dunia) Natuna di bagian selatan kepulauan Spratly, mengkhawatirkan bahwa dirinya pun akan mengalami penderitaan yang sama dengan apa yang tengah ada di atas wilayah Mischief Reef (dipersengketakan Filipina dan Cina namun telah direbut melalui kekuatan oleh Cina) jika ia tidak memelihara keamanannya sendiri.

Sumber-Sumber Friksi di Asia Tenggara: Kasus Amerika Serikat

Prioritas yang diterima Asia Tenggara dari Washington selama Perang Dingin, setidaknya sampai jatuhnya Saigon pada tahun 1975, kini tidak tampak lagi. Akan tetapi kepentingan A.S. betul-betul terletak pada fakta bahwa Asia Tenggara adalah suatu pasar penting bagi produk-produk Amerika karena ia lebih banyak menyerap ekspor Amerika

dibandingkan Amerika Latin dan Timur Tengah dikombinasikan.

Kekalahan A.S. di Vietnam menghasilkan dampak-dampak yang luas. Salah satu akibat adalah penurunan nyata akan pemahaman atas Asia Tenggara. Terlepas dari apakah hal ini benar atau tidak – dan pendirian kembali hubungan-hubungan diplomatik A.S. dan Vietnam yang dapat memperbaiki sebagian penyimpangan – tetap tidak jelas apakah Amerika Serikat memahami kepercayaan diri yang telah diperoleh ASEAN akan kapasitasnya guna mengusahakan kepentingan-kepentingan dan menetapkan agendanya sendiri.

Dari segi politik, meski ASEAN masih memiliki hasrat untuk melihat keterlibatan militer A.S. pada kawasan, mereka tidak lagi menganut diri terhadap tatanan pengaturan Perang Dingin yang telah usai yang meletakkan keutamaan terhadap kepemimpinan Amerika atas baik bidang kekuasaan politik-keamanan maupun perekonomian. Bagi A.S., pada sisi lain, ide keterlibatan tanpa kepemimpinan sulit diterima. Peletakkan kepentingan A.S. yang berlanjut atas sasaran-sasaran keamanan militer yang telah ada, seperti misalnya di Thailand, mendemonstrasikan preferensinya untuk suatu susunan keamanan yang formal. Penerimaan Amerika, setelah sebelumnya diawali keraguan, atas pendekatan menuju pengelolaan keamanan multilateral yang didasari konsepsi-konsepsi ASEAN yang terinstitusionalisasi melalui ASEAN Regional Forum (ARF), adalah suatu tanda penyesuaian yang lebih besar. Akan tetapi masih ada kesangsian mengenai prinsip-prinsip dialog, kebersamaan dan hubungan bertanggungan yang baik yang merupakan ciri-ciri ASEAN yang bertolak belakang dengan pengelolaan keamanan regional yang realistis. Ketidaksabaran atas pengembangan program langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang diperlihatkan pejabat-pejabat Amerika dengan keterlibatannya di dalam pertemuan-pertemuan ASEAN adalah



States, and other countries, would rapidly engage wider interests.

Chinese leadership professes its absolute need to concentrate over the next half-century (or more) upon the immense challenges of internal social-economic change. Stepped-up escalation over the Spratley's could not serve that purpose. Evidence of efforts to limit clashes there to a manageable level offers some proof of deliberate calculation of China. However, ASEAN members were particularly disturbed when Beijing stated its claim to all the islands and reefs in the South China Sea. As results, distrust of China is visible rising despite its assurance that it will not undertake any unilateral action that could cause tension and destabilize the region. There seems among ASEAN members a growing support for sending signals which could constrain China's creeping assertiveness. For example, Indonesia whose Natuna gas fields in the southern part of the Spratley Islands are the world's largest, fears that it too might suffer a *Mischief Reef (disputed by the Philippines and China but taken by force by the latter) if it does not look after its own security.*

Sources of Friction in Southeast Asia: The Case of the United States

The priority that Southeast Asia received from Washington during the Cold War, at least until the fall of Saigon in 1975, is no longer evident. However, United States self-interest resides emphatically in the fact that Southeast Asia is an important market for American products since it absorbs more American exports than Latin America and the Middle East combined.

The American defeat in Vietnam produced wide-ranging repercussions. One result is an apparent decline in understanding of Southeast Asia. Apart from whether this is correct or not - and the mid-1995 reestablishment of US

diplomatic relations with Vietnam may redress some of the drift-it is not clear that the United States comprehends the self-confidence which ASEAN members have acquired about their own capacity to pursue their own interests and set their own agenda.

In political terms, ASEAN countries while sharing a desire to see the United States remain engaged militarily in the region, no longer subscribe to the former Cold War management order which accorded pre-eminence to American leadership in either political-security or economic domains. For the United States, on the other hand, the notion of engagement but without leadership is difficult to accept. Continued American attachment to established military security targets, like for example in Thailand, demonstrates its preference for a formal security arrangement.

But American acceptance, after an initial hesitation, of an approach to multilateral security management based on ASEAN conceptions institutionalized through the ASEAN Regional Forum (ARF), is a sign of greater adaptability. There remains, however, some skepticism about the principles of dialogue, inclusiveness, and good neighborliness which are the trademarks of the ASEAN approach contrary to a realistic regional security management. Impatience over the development of a program confidence building measures as shown by American officials in their involvement in ASEAN meetings is proof of such underlying skepticism. The very idea process is as important as outcome and that the need to agree to confidence-building measures is no greater than the need to go on talking about doing so, is more difficult to accept in the realist tradition of alliance security management.

American military engagement with Southeast Asia is designed to protect interests that are now

essentially economic for which stability is indispensable. At the same time, emphasis in American foreign policy on good governance, democracy, and human rights is region-wide. Issues of trade and labor standards, of patents and intellectual property, figure much on the American agenda with individual ASEAN members. However, it is in the economic area and the assertion by the United States in pursuit of greater Asia-Pacific free trade under APEC, that provides a principal source of discomfort between the majority of ASEAN governments and the United States. Fear of framework, has influenced ASEAN's views ranging from resistance to a prescriptive trade liberalization agenda (Malaysia and Thailand) to wariness (Indonesia).

ASEAN governments are less convinced by arguments that if the United States does not support their objectives of free trade, it will lose interest and turn its back on Asia. The fact still remains that the very size of present and future American trade interests in the Asia-Pacific will continue to be a major influence on any calculation of vital American interests.

Salient Issues Pacing ASEAN

The Spratley Islands in the South China Sea could well become the scene of a major dispute involving six or seven Asian states. These islands are currently occupied by five states, i.e. Vietnam, the Philippines, Malaysia, Taiwan and China. The occupying countries back their claims with military claims such as airstrips and armed forces on several islands. A map of the South China Sea shows these islands located at some distant from the larger land masses of Southeast Asia. Generally, a state's territory commonly extends twelve nautical miles as an exclusive economic zone. Within this islands within this zone, a state can exercise its rights to fish while prohibiting other states. A state claiming islands no matter how insignificant they appear on maps and navigation charts can



bukti adanya keraguan-keraguan yang mendasar. Gagasan bahwa proses sama pentingnya dengan hasil yang terperoleh dan bahwa kebutuhan untuk menyetujui langkah-langkah pembangunan kepercayaan tidak lebih besar daripada kebutuhan untuk meneruskan pembicaraan untuk menjalankannya adalah lebih sulit untuk diterima di dalam tradisi pengelolaan aliansi keamanan realis.

Hubungan militer Amerika dengan Asia Tenggara dirancang untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, yang pada dasarnya kini ekonomis, di mana stabilitas sangat diperlukan. Pada waktu bersamaan penekanan di dalam kebijakan luar negeri Amerika atas pemerintahan yang baik, demokrasi dan HAM yang berskala regional. Isu-isu perdagangan dan standar perburuhan serta masalah paten dan hak kepemilikan intelektual sangat diperhitungkan di dalam agenda Amerika terhadap tiap-tiap anggota ASEAN.

Namun, adalah di bidang ekonomi dan ketegasan A.S. untuk mengusahakan suatu perdagangan bebas di bawah APEC-lah yang merupakan sumber kegelisahan utama antara mayoritas pemerintahan-pemerintahan ASEAN dengan Amerika Serikat. Kekhawatiran akan dominasi perekonomian A.S., dan penurunan arti penting ASEAN di dalam kerangka regional manapun, telah mempengaruhi pandangan-pandangan ASEAN dari permasalahan perlawanan hingga ketentuan-ketentuan agenda liberalisasi perdagangan (Malaysia dan Thailand) sampai kepada kewaspadaan (Indonesia).

Pemerintah-pemerintah ASEAN kurang mempercayai argumentasi-argumentasi bahwa jika A.S. tidak mendukung tujuan-tujuan perdagangan bebasnya, A.S. akan mengabaikan ketertarikannya dan membelakangi Asia. Fakta tetap menunjukkan bahwa besarnya kepentingan-kepentingan perdagangan Amerika kini dan di masa mendatang pada wilayah Asia-Pasifik akan tetap menjadi pengaruh besar atas kalkulasi apapun yang terkait dengan

kepentingan-kepentingan vital Amerika.

Isu-Isu Menonjol yang Dihadapi ASEAN

Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan dapat betul-betul menjadi suatu kancah pertikaian besar yang melibatkan 6 ataupun 7 negara-negara Asia. Kepulauan-kepulauan tersebut kini tengah diduduki lima negara, yang antara lain adalah Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Cina. Negara-negara tersebut mendukung berbagai klaim mereka dengan pengadaan militer seperti landasan terbang dan angkatan bersenjata pada beberapa pulau. Suatu peta yang menggambarkan Laut Cina Selatan akan menunjukkan bahwa pulau-pulau tersebut terletak berjauhan dari daratan-daratan Asia Tenggara yang lebih besar. Umumnya, wilayah teritorial suatu negara biasanya menjorok keluar hingga dua belas mil laut sebagai suatu zona perekonomian eksklusif. Suatu negara dapat menggunakan haknya untuk menangkapikan di dalamnya sembari melarang negara-negara lainnya dalam melakukan kegiatan yang sama. Sebuah negara yang mengklaim pulau-pulau, terlepas dari masalah berarti tidaknya pulau-pulau tersebut terlihat pada peta-peta dan peta-peta pelayaran, dapat secara efektif memperluas sumber dayanya. Pokok ini tidak hilang di Tenggara ketika *kekuatan militer* dianggap sebagai aset yang berharga.

Kepulauan Spratly kini telah berkembang menjadi suatu daerah perikanan penting bagi Cina, Filipina dan Vietnam. Di samping itu, terdapat kemungkinan adanya sumber daya yang lebih berharga: *minyak dan gas*. Sumber-sumber energi baru bagi Cina maupun Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia dapat memacu perluasan perekonomian mereka masing-masing. Cina, yang kini merupakan pengeksport minyak, dapat menjadi pengimpor minyak dan gas di dalam satu dekade terkecuali jika negara ini menemukan sumber-sumber baru yang berarti. Pencarian sumber-sumber ini telah menjadi

elemen vital di dalam pembangunan perekonomian Cina yang akan mendorongnya menggantikan kebijakan-kebijakan pertahanannya dan menghasilkan peningkatan kekuatan militer. Implikasi macam apakah yang akan dibawakan situasi ini atas keamanan Asia Tenggara dan Asia Pasifik pada umumnya? Ada tiga macam pemikiran atas masalah ini:

(a) Berdasarkan teori *power-linkage*, yang mengetengahkan anggapan bahwa Cina cepat atau lambat akan menjadi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara ketika kekuatan ekonominya meningkat akan menghasilkan suatu peningkatan kekuatan militer yang kemudian mendorongnya untuk memaksakan kepentingan-kepentingan dan sasaran-sasarannya terhadap negara-negara lainnya. Tibanya Cina di kancah perekonomian dan, hampir dipastikan, kancah militer sebagai suatu *superpower* utama pada abad mendatang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam tantangannya terhadap sistem internasional. Teori ini mendasari argumentasinya atas dasar-dasar historis yang menandakan bahwa suatu kekuatan utama yang sedang bangkit akan menantang tatanan dunia dari kekuatan utama sebelumnya. Beberapa penulisnya mencapai kesimpulan bahwa peningkatan arus perdagangan antara negara-negara Asia Timur dan Tenggara pada satu sisi dan Cina di sisi lainnya dapat membawa implikasi-implikasi serius terhadap kelompok pertama.

(b) Pemikiran kedua melihat kebangkitan Cina di dalam peristiwa-peristiwa dunia sebagai suatu kekuatan yang sedang tumbuh dan bukan sebagai ancaman di mana Cina merupakan kesempatan kekuatan-kekuatan lainnya dalam mendirikan hubungan-hubungan yang stabil dan yang dapat dijalankan dengan sekitar seperempat jumlah populasi dunia, dan untuk mengintegrasikan Cina secara damai dan konstruktif ke dalam berbagai norma dan institusi komunitas global. Pendukung



effectively extends its resources. This point is not lost on the Southeast states when military strength is considered to be a valuable asset.

The Spratley Islands are already developing into important fishing grounds for China, the Philippines, and Vietnam. In addition, there is also the possibility of even more valuable resources: oil and gas. New sources of energy for China as well as Vietnam, the Philippines, Malaysia and Indonesia, could further power their expanding economies. China, currently an exporter of oil, may become an importer of oil and gas within a decade unless it finds substantial new resources. The quest for these resources has become a vital element in China economic development which would force it to change its defense policies resulting in an increasing military build-up. What kind of implication this would have for the security of Southeast Asia and the Asia-Pacific in general? There are three schools of thought on the matter.

(a) Based on the power-linkage theory, it asserts that China will sooner or later become a threat to the Southeast Asian region as its increased economic power will result in an increase of its military power and imposing its interest and aims on other countries. China's arrival on the economic and more than likely military scene as major superpower early on the next century is unprecedented in its challenge to the international system. It based their arguments on historical grounds which asserts that a rising great power will challenge the world order of the preceding great power. Several writers came to the conclusion that an increase in trade flow between East Asian and Southeast Asian countries, on the one hand, and China, on the other hand, may bring about serious implications to the former.

(b) The second school of thought sees China's rise in world affairs as a growing power and not as threat, but as an opportunity for

other powers to establish stable and workable relations with one-quarter of the world's populations, and to integrate China peacefully and constructively into norms and institutions of the global community. Proponents of this school of thought contend that a prosperous and stable China will be in the interest of stability in the Asia-Pacific, and that a China fully integrated into the international system is far less destabilizing than a China isolated from it. There are of course, tough issues which China should address, like for example, the claim that Taiwan as part of China, Tibet, human rights, the unification of Korea, regional security and environmental concerns. This school of thought advocate working with China to address and resolve these and other issues, rather than criticizing China's behavior. This view is in line with the interdependence theory of the global economic system. The reasoning is that once China is fully integrated into the global economic system, the political repercussions of embarking on an aggressive foreign policy will be too costly. Furthermore it asserts that an improvement of China's economy would possibly make the country more democratic and more peacefully.

(c) An alternative to these two school of thoughts which is more in line with ASEAN's policies is that China at present can be considered an asset for the Asia-Pacific region, but in the long-run has the potential to be a threat. When the threat become a reality, ASEAN would be forced to meet and deal with such a threat. The only mechanism available to ASEAN which comes to mind is the ASEAN Regional Forum (ARF). But the ARF has not been designed to deal with hard security issues. It has no formal military dimension and, therefore, has no mechanism to deal with a situation beyond the ASEAN context is underway, the the ARF does not have a mechanism to deal with conflict resolution, or a mechanism for peacekeeping operations should negotiations lead

to a settlement.

The situation in the the Asia-Pacific in the years to come does not warrant an optimistic assessment. The collapse of the Soviet Union and American disengagement from Asia have changes China's strategic circumstances. It is no longer subject to containment. With the removal of these constraints China has been able to act in a more assertive manner over the last decade. China's military modernization program, its territorial claims in the South China Sea, its arms sales activities are the main sources of apprehension. These all have aroused suspicion about Beijing intentions. Given the fact that the present security architecture, i.e. the ARF and the spider web of defense relations which has now emerged is defective in the sense that it cannot deal with security challenges in the twenty-first century, a regional arms race and the emergence of Chinese power, ASEAN should seriously consider the development of more formal defense linkages.

Apart from external threats, the question of non-interference in domestic affairs of other members has become increasingly more problematic than before as was the case of Anwar Ibrahim in Malaysia, Aung San Suu Kyi in Myanmar, and the problem of East Timor in Indonesia as ASEAN still adheres to the cardinal principle of non-interference. This principle is difficult to sustain in a world where it has become increasingly difficult to draw a line between domestic and international issues. In the words of James Rosenau of George Washington University: "To separately analyze domestic and foreign affairs is more than arbitrary: it is downright erroneous. The two have always been a seamless web and the need to treat them as such is urgent in this time of enormous transformation". The dilemma ASEAN is facing if it still considers the principle of non-interference as non-negotiable will be more pronounced in the twenty-first century.



Menolak intervensi asing

pemikiran ini berpendapat bahwa Cina yang makmur dan stabil akan berkesesuaian dengan arti penting stabilitas Asia-Pasifik, dan bahwa suatu Cina yang terintegrasi penuh ke dalam sistem internasional kecil sekali kernungkinannya akan menjadi penyebab ketidakstabilan dibandingkan Cina yang terisolasi darinya. Tentunya memang ada beberapa isu sulit yang harus diketengahkan Cina seperti klaimnya bahwa Taiwan merupakan bagian darinya, Tibet, HAM, unifikasi Korea, keamanan regional dan permasalahan lingkungan. Pemikiran ini menyokong kerjasama dengan Cina dalam menangani dan memecahkan isu-isu di atas dan yang lainnya daripada mengkritik perilakunya. Pandangan ini cocok dengan teori interdependensi sistem perekonomian global. Pertimbangannya adalah bahwa Cina akan melihat pengusahaan kebijakan luar negeri yang agresif, saat ia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perekonomian global, hanyalah akan membawa akibat-akibat politik yang terlalu mahal. Secara lebih jauh, teori ini mengedepankan anggapan bahwa perbaikan perekonomian Cina mungkin akan membuatnya lebih demokratis dan lebih bersifat damai.

(c) Alternatif dari kedua pemikiran di atas, yang lebih

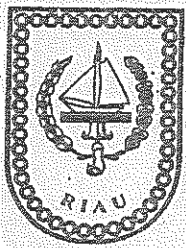
berkesesuaian dengan kebijakan-kebijakan ASEAN, adalah bahwa Cina dewasa ini dapat dianggap sebagai aset bagi kawasan Asia-Pasifik yang mana di masa mendatang berpotensi menjadi ancaman. Ketika ancaman menjadi nyata, ASEAN akan dipaksa untuk menghadapi dan menanganinya. Satu-satunya mekanisme yang tersedia bagi ASEAN yang terlintas di dalam pikiran adalah ARF. Namun ARF tidak dirancang untuk menangani isu-isu keamanan yang sulit (*hard security issues*). ARF tidak memiliki dimensi militer yang formal dan, karenanya, tidak mempunyai mekanisme untuk menangani situasi di luar konteks ASEAN pada situasi di mana suatu negara memaksakan diri dalam hubungannya dengan negara lain. ARF tidak memiliki mekanisme untuk menangani resolusi konflik saat konflik telah berlangsung ataupun mekanisme untuk operasi-operasi pemelihara perdamaian jika negosiasi membuahkan penyelesaian.

Situasi Asia Pasifik di tahun-tahun mendatang tidak membenarkan adanya penilaian yang optimistis. Runtuhnya Uni Soviet dan peregangannya hubungan Amerika dari Asia telah merubah keadaan-keadaan strategis Cina. Cina bukan lagi merupakan sasaran pengurangan. Dengan lenyapnya batasan-batasan ini Cina

telah mampu bertindak secara lebih tegas selama dekade lalu. Program modernisasi militernya, berbagai klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan, kegiatan penjualan senjatanya merupakan sumber-sumber penyebab utama keprihatinan. Seluruhnya telah merangsang kecurigaan terhadap Beijing. Mengingat bahwa kerangka bangunan keamanan dewasa ini, seperti misalnya ARF dan jaringan laba-laba berbagai hubungan pertahanan yang telah ada kurang efektif dalam pengertian bahwa mereka tidak dapat menangani tantangan-tantangan abad ke-21, proliferasi senjata regional dan bangkitnya kekuatan Cina, maka ASEAN harus sungguh-sungguh mempertimbangkan pengembangan hubungan-hubungan pertahanan yang lebih formal.

Terlepas dari ancaman-ancaman eksternal, pertanyaan mengenai intervensi urusan domestik anggota-anggota telah semakin problematis dibandingkan masa sebelumnya seperti yang telah terlihat pada kasus Anwar Ibrahim di Malaysia, Aung San Suu Kyi di Myanmar dan masalah Timor Timur di Indonesia sementara ASEAN masih tetap setia dengan asas pokok non-intervensi. Prinsip ini sulit dipertahankan di dalam dunia yang tidak lagi memiliki batas-batas yang jelas antara isu-isu domestik dan internasional. Dengan mengutip James Rosenau dari Universitas Washington: "Untuk menganalisa urusan domestik dan asing secara terpisah lebih dari sekedar kesewenang-wenangan; tindakan ini betul-betul keliru. Keduanya telah selalu merupakan jaringan tanpa kelim dan kebutuhan untuk memperlakukannya secara demikian mendesak pada masa transformasi sangat besar seperti ini."

Dilemma yang sedang dihadapi ASEAN jika ia tetap mempertimbangkan prinsip non-intervensi sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar kan semakin menonjolkan diri pada abad ke-21.



**PEMERINTAH PROPINSI RIAU
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telepon (0761)-31222, 33617, 33746, 33749 Fax. (0761)-33477

PEKANBARU

Mengucapkan

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1421 H

mohon maaf lahir dan batin



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 - 31402 - 34425 Padang

<http://www.sumbar.go.id> e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA

IDUL FITRI

I SYAWAL 1421 H

mohon maaf lahir dan batin